

HEADLINE NEWS

DPRD BUTON SELATAN TUNTASKAN AGENDA MASA SIDANG PERTAMA, FOKUS LEGISLASI, AWASI PEMBANGUNAN, DAN DORONG LISTRIK PLTS DI WILAYAH KEPULAUAN



LA ODE NURUNANI

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BUTON SELATAN

“
Pengawasan
merupakan amanat
konstitusi agar setiap
program pemerintah
benar-benar memberi
manfaat bagi
masyarakat.
”



FOKUS UTAMA DPRD BUSEL

**Pembahasan KUA-PPAS TA 2027,
KUA-PPAS Perubahan APBD 2026,
dan Rancangan Perda Perubahan
APBD 2026**



**Pengawasan ketat pembangunan
Kantor Bupati, realisasi anggaran,
dan capaian proyek**



**Dorong pembangunan PLTS untuk
±30 wilayah kepulauan yang belum
teraliri listrik**



**Perkuat fungsi representasi melalui
10–20 Rapat Dengar Pendapat (RDP)
tindak lanjuti aspirasi masyarakat**



**Target selesai KUA-PPAS dan Perubahan
APBD paling lambat September 2026,
pembahasan RAPBD 2027 di Oktober 2026**

“
Komitmen menghadirkan listrik
untuk Pulau Kadatua, Siompu,
dan Batuatas sebelum akhir
masa jabatan bupati.
”



DASAR HUKUM:

- UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



Sejalan dengan SDGs Tujuan ke-7:
Energi bersih, terjangkau,
dan berkelanjutan untuk semua.

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan memasuki masa sidang ketiga Tahun 2026 dengan memprioritaskan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026. Agenda tersebut dilaksanakan setelah seluruh agenda masa sidang pertama berhasil dituntaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan, La Ode Nurunani, mengatakan pembahasan KUA-PPAS masih berada

pada tahap persiapan karena dokumen dari pemerintah daerah belum disampaikan secara resmi kepada DPRD. Meski demikian,

rapat pendahuluan telah dilaksanakan agar pembahasan dapat segera dimulai setelah dokumen diterima. “Kami berharap

pemerintah daerah segera menyerahkan dokumen KUA-PPAS sehingga seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal,” ujar Nurunani kepada Baubau Post, Senin (13/7/2026).

Selain menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, DPRD terus mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pembangunan Kantor Bupati

Buton Selatan. Secara berkala, pemerintah daerah diminta menyampaikan perkembangan fisik pekerjaan, realisasi anggaran, serta capaian proyek guna memastikan seluruh proses pembangunan berlangsung sesuai rencana. “Pengawasan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan DPRD agar

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Sambut Tim MA Tinjau Lokasi Penga- dilan Agama Buton Tengah, Operasional Kian Dekat



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menempatkan Pengadilan Agama Buton Tengah sebagai salah satu dari 12 pengadilan agama baru yang menjadi prioritas nasional. Komitmen tersebut ditandai dengan kunjungan kerja tim gabungan

MA, Badan Peradilan Agama (Badilag), Kementerian Pen-dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN-RB), serta Kementerian Sekretariat Negara ke Kabupaten Buton Tengah, Jumat (10/7/2026), untuk meninjau kesiapan operasional sekaligus

Lanjut ke Hal: 7

Kepala BKPSDM Buton Selatan Jamaluddin Ungkap Pengumuman Tiga Besar Hasil Seleksi JPT Pratama Masih Menunggu Rekomendasi BKN

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) memastikan pengumuman tiga besar hasil Seleksi Ter-



Lanjut ke Hal: 7

BPJS Kesehatan Perluas Akses JKN Lewat LANURI, Kepulauan Buton Dapat Delapan Titik Layanan



Laporan: Firman

JAKARTA, BP- BPJS Kesehatan terus memperkuat pemerataan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan meluncurkan

program Layanan Ujung Negeri (LANURI) yang menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Baubau, program tersebut diwujudkan melalui

delapan titik layanan yang tersebar di Kota Baubau dan enam kabupaten di Kepulauan Buton.

Peluncuran LANURI dilaksanakan secara nasional pada Senin

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Serap Aspirasi Petani Saat Tinjau Lahan di Puncak Wawoangi, Kaji Usulan Jalan Tani, Sumur Bor, dan Bibit Kelapa Genjah

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mulai memetakan potensi pengembangan kawasan pertanian di Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, setelah Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., meninjau langsung lahan pertanian milik warga di kawasan Puncak Wawoangi, Senin (13/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap program pem-



bangunan pertanian disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam peninjauan itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Desa

Wawoangi. Selain melihat kondisi lahan, rombongan juga mengidentifikasi potensi komoditas unggulan yang dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat apabila dikembangkan secara berkelanjutan. “Lahan yang terse-

dia memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan budidaya kelapa genjah entok, alpukat mente-ga, maupun tanaman pisang yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat,” kata Bu-

Lanjut ke Hal: 7

DPRD Buton Tuntaskan Agenda Masa Sidang Pertama, Fokus Legislasi, Awasi Pembangunan, dan Dorong Listrik PLTS di Wilayah Kepulauan

setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.

Perhatian DPRD juga diarahkan pada pemerataan pelayanan dasar, khususnya akses listrik di wilayah kepulauan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan saat ini tengah mempersiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui koordinasi Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah bersama PLN dan kementerian terkait. Sedikitnya sekitar 30 wilayah yang belum menikmati layanan listrik menjadi prioritas dalam program tersebut. “Pemerintah ingin masyarakat di wilayah 3T memperoleh pelayanan kelistrikan yang sama dengan masyarakat di Batauga, Sampolawa, maupun Lapandewa,” ujar Nurunani.

Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan target Bupati Buton Selatan untuk menghadirkan listrik sebelum masa jabatannya berakhir, terutama bagi mas-

yarakat di Pulau Kadatua, Pulau Siompu, dan Pulau Batuatas. Selain memperluas akses energi, pemerintah daerah juga terus memperkuat sektor pertanian melalui perencanaan yang lebih terarah agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, sepanjang masa sidang pertama DPRD telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Selatan, mulai dari penyusunan jadwal melalui Badan Musyawarah (Banmus), penyiampaian pidato pengantar, pembahasan hingga persetujuan DPRD. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. DPRD juga menuntaskan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai mekanisme yang berlaku.

DPRD turut memperkuat fungsi representasi melalui pelaksanaan

Rapat Dengar Pendapat (RDP). Selama masa sidang pertama, sekitar 10 hingga 20 RDP digelar untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan pendidikan, pembebasan lahan hingga pelayanan publik. Bahkan, dalam beberapa kesempatan RDP dilaksanakan dua kali dalam sehari dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). “Banyak solusi yang berhasil disepakati bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui forum tersebut,” ungkap Nurunani.

Secara historis, penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD merupakan amanat reformasi pemerintahan daerah yang semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur taha-

pan pembahasan KUA-PPAS hingga APBD. Di tingkat global, pemanfaatan energi surya terus berkembang sebagai bagian dari agenda transisi energi yang didorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ketujuh mengenai akses energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019, pembahasan KUA-PPAS dan Perubahan APBD ditargetkan rampung paling lambat September 2026. Setelah itu, DPRD Kabupaten Buton Selatan akan memasuki tahapan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 pada masa sidang Oktober mendatang. DPRD berharap seluruh agenda tersebut dapat diselesaikan tepat waktu sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton Selatan. (*)

Bupati Azhari Sambut Tim MA Tinjau Lokasi Pengadilan Agama Buton Tengah, Operasional Kian Dekat

lokasi pembangunan gedung permanen pengadilan tersebut.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Sahwan, S.H., M.H., menegaskan bahwa percepatan pembentukan Pengadilan Agama Buton Tengah merupakan bagian dari agenda nasional dalam memperluas akses layanan peradilan. “Pengadilan Agama Buton Tengah merupakan salah satu dari 12 pengadilan agama baru yang menjadi prioritas nasional,” ujar Sahwan saat melakukan visitasi bersama rombongan.

Tim yang dipimpin Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI itu diterima langsung Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati. Selanjutnya, rombongan meninjau gedung sementara Pengadilan Agama di Kelurahan Lakudo serta lahan pembangunan kantor permanen di Kompleks Perkantoran Labungkari yang telah memiliki sertifikat atas nama Pengadilan Agama Buton Tengah.

Bupati Azhari menyatakan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah siap mendukung seluruh kebutuhan operasional awal hingga pembangunan gedung permanen dapat direalisasikan. “Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh agar Pengadilan Agama segera beroperasi sehingga pelayanan hukum semakin mudah dijangkau masyarakat,” kata Azhari.

Menurut Azhari, kehadiran Pengadilan Agama akan memangkas waktu dan biaya masyarakat yang selama ini harus bepergian ke kabupaten lain untuk menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. “Masyarakat Buton Tengah membutuhkan

layanan hukum yang dekat, cepat, dan berkeadilan,” ujarnya.

Selain memeriksa kesiapan Pengadilan Agama, tim Mahkamah Agung juga meninjau lahan yang diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan Pengadilan Negeri Buton Tengah. Pemerintah daerah bahkan menyiapkan langkah lanjutan untuk menghadirkan Kantor Kejaksaan Negeri Buton Tengah sebagai bagian dari penguatan sistem penegakan hukum di daerah.

Kunjungan tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, para Ketua Pengadilan Agama dari Buton, Baubau, dan Muna, perwakilan Pengadilan Negeri Baubau dan Buton, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat operasional lembaga peradilan baru tersebut.

Secara historis, pembentukan pengadilan baru merupakan kebijakan yang terus dilakukan Mahkamah Agung sejak era reformasi guna memperluas akses terhadap keadilan, terutama di daerah hasil pemekaran. Di tingkat internasional, prinsip access to justice juga menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 16 yang menekankan pentingnya lembaga peradilan yang efektif, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Kehadiran Pengadilan Agama Buton Tengah diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan hukum yang lebih cepat, efektif, dan berkeadilan bagi warga di wilayah tersebut. (*)

BPJS Kesehatan Perluas Akses JKN Lewat LANURI, Kepulauan Buton Dapat Delapan Titik Layanan

(13/7/2026). Program ini mengintegrasikan layanan administrasi JKN melalui Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) berbasis video conference serta layanan jemput bola BPJS Kesehatan melalui video conference untuk mengurus administrasi kepesertaan JKN, memperoleh informasi, maupun menyampaikan pengaduan. Pelaksanaannya didukung berbagai pemangku kepentingan daerah dengan memanfaatkan fasilitas publik seperti puskesmas, kantor desa, kantor kecamatan, hingga sekolah.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan LANURI merupakan bagian dari implementasi Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah dengan akses terbatas. “Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan wujud implementasi Layanan Ujung Negeri (LANU-

serta; serta Puskesmas Soloy Agung, Kabupaten Buton Utara delapan peserta.

Melalui layanan VIOLA, masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan melalui video conference untuk mengurus administrasi kepesertaan JKN, memperoleh informasi, maupun menyampaikan pengaduan. Pelaksanaannya didukung berbagai pemangku kepentingan daerah dengan memanfaatkan fasilitas publik seperti puskesmas, kantor desa, kantor kecamatan, hingga sekolah.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan LANURI merupakan bagian dari implementasi Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah dengan akses terbatas.

“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan wujud implementasi Layanan Ujung Negeri (LANU-

RI). Hari ini layanan tersebut dilaksanakan serentak di 558 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Harapan kami, masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh akses layanan JKN yang mudah,” ujar Prihati.

Ia menjelaskan, layanan digital belum dapat diterapkan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia karena masih terdapat kendala jaringan telekomunikasi, kondisi geografis, serta rendahnya literasi digital di sejumlah daerah. Oleh karena itu, BPJS Keliling tetap menjadi solusi pelayanan langsung bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan daring. Secara nasional, sepanjang Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali, dengan mayoritas pengguna berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Prihati juga men-

gungkapkan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan peserta JKN melalui berbagai inovasi serta penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengapresiasi inovasi BPJS Kesehatan tersebut dan menilai jaringan Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung layanan VIOLA maupun BPJS Keliling. Dukungan serupa juga disampaikan Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, yang menyatakan TNI siap mendukung pelaksanaan LANURI melalui fasilitas kesehatan milik TNI, kapal rumah sakit, tenaga kesehatan, serta sekitar 76 ribu personel Babinsa agar akses layanan JKN semakin merata hingga pelosok negeri. (*)

Kepala BKPSDM Buton Selatan Jamaluddin Ungkap Pengumuman Tiga Besar Hasil Seleksi JPT Pratama Masih Menunggu Rekomendasi BKN

buka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama belum dapat dilakukan karena masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton Selatan Ahmad Jamaluddin, S.H., M.H., mengatakan mekanisme tersebut merupakan bagian dari prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi.

Menurutnya, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di BKN, hasil seleksi berupa tiga

nama peserta dengan nilai terbaik baru dapat diumumkan setelah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menerima rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara.

“Pengumuman tiga besar akan dilakukan setelah kami menerima rekomendasi hasil dari Badan Kepegawaian Negara. Saat ini kami masih menunggu hasil tersebut,” ujar Ahmad Jamaluddin pada media Baubau Post, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, seluruh tahapan seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah rekomendasi dari BKN diterbitkan, pemerintah daerah akan segera men-

yampaikan hasil seleksi kepada publik sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

BKPSDM memastikan seluruh proses Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengimbau seluruh peserta seleksi untuk bersabar menunggu proses administrasi di BKN selesai. Pengumuman resmi akan disampaikan setelah rekomendasi diterima oleh pemerintah daerah. (*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Serap Aspirasi Petani Saat Tinjau Lahan di Puncak Wawoangi, Kaji Usulan Jalan Tani, Sumur Bor, dan Bibit Kelapa Genjah

pati H. Muhammad Adios saat berdialog dengan warga di lokasi peninjauan.

Pada kesempatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting

untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Aspirasi yang disampaikan meliputi bantuan bibit kelapa genjah entok, pembangunan sumur bor sebagai sumber air pertanian,

serta pembangunan jalan tani guna memperlancar aktivitas petani dan distribusi hasil panen.

Menanggapi berbagai usulan itu, Bupati menegaskan pemerintah daerah akan mengkaji

seluruh aspirasi sesuai mekanisme yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Setiap usulan masyarakat akan kami pelajari berdasarkan kebutuhan di

lapangan, skala prioritas, dan kemampuan anggaran yang tersedia,” ujarnya.

Menurut Adios, kunjungan lapangan menjadi langkah penting agar setiap kebijakan pembangunan tidak hanya disusun berdasarkan laporan administrasi, tetapi juga berdasarkan fakta yang ditemui secara langsung. “Pembangunan akan lebih tepat sasaran apabila diawali dengan melihat langsung kondisi masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah,” katanya.

Penguatan sektor pertanian merupakan salah satu strategi yang terus didorong pemer-

intah di berbagai daerah Indonesia. Sejak pemerintah melaksanakan program penguatan ketahanan pangan nasional dalam beberapa tahun terakhir, daerah didorong mengembangkan komoditas unggulan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketersediaan pangan nasional.

Secara internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) juga menekankan bahwa pengembangan pertanian berkelanjutan harus didukung oleh infrastruktur dasar, akses air, benih unggul, dan keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah perubahan iklim.

Melalui peninjauan langsung di Desa Wawoangi, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap pengembangan komoditas unggulan yang disesuaikan dengan karakteristik lahan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang pembangunan daerah. (*)

DPR Restui Dana Awal Rp4 Triliun untuk Amankan Pelaksanaan Haji 2027



Raker Komisi VIII DPR dengan Menteri Haji dan Umrah.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Komisi VIII DPR RI menyetujui pembayaran uang muka layanan tenda untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 sebesar Rp4,07 triliun. Persetujuan tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memastikan Indonesia tetap memperoleh layanan dan kuota jemaah haji setelah pemerintah Arab Saudi menetapkan batas waktu pembayaran komitmen awal.

Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7).

Dana yang disetujui tersebut akan digunakan untuk membayar uang muka penyediaan tenda bagi jemaah haji Indonesia di kawasan layanan haji Arab Saudi. Pembayaran awal menjadi salah satu persyaratan dalam sistem penyelenggaraan haji yang diterapkan pemerintah Arab Saudi kepada negara-negara pengirim jemaah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, persetujuan pembayaran dilakukan

setelah mempertimbangkan kebutuhan pelayanan jemaah serta batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak Arab Saudi.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui kebutuhan transfer uang muka terkait biaya tenda sebesar 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halala. Ekuivalen dengan Rp4.007.471.080.797,” kata Marwan.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan, pembayaran tersebut harus segera direalisasikan karena batas waktu yang diberikan pemerintah Arab Saudi akan berakhir pada Rabu (15/7). Menurut dia, pembayaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kepastian keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan haji tahun berikutnya.

“Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran ini dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan,” ujar Irfan.

Ia menyebutkan, keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap keberangkatan jemaah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memiliki kewenangan untuk mengalihkan kesempatan negara yang tidak memenuhi komitmen awal kepada negara lain.

“Jika pembayaran tidak dilakukan sesuai tenggat, pemerintah Saudi dapat memutuskan negara tersebut tidak mengirim jemaah haji tahun depan,” kata Irfan.

Menurut Irfan, sistem tersebut merupakan mekanisme yang telah berjalan dalam tata kelola penyelenggaraan haji internasional. Setiap negara pengirim jemaah harus memberikan kepastian agar layanan akomodasi, transportasi, dan fasilitas pendukung dapat dipersiapkan lebih awal.

Ia menambahkan, apabila terdapat negara lain yang belum memenuhi kewajiban

pembayaran, Indonesia juga memiliki peluang mendapatkan tambahan layanan atau slot kuota melalui mekanisme yang berlaku.

“Jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain. Itu pola permainan yang ada di haji,” jelasnya.

Secara historis, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Sejak penyelenggaraan haji modern berkembang pada abad ke-20, pemerintah Indonesia terus melakukan penyediaan sistem pengelolaan haji untuk menjamin keberangkatan dan pelayanan jutaan umat Muslim setiap tahun.

Dalam sejarah nasional, pengelolaan haji Indonesia mengalami perubahan besar setelah pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Lembaga tersebut memiliki tugas mengelola keuangan haji secara transparan dan profesional untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji.

Di tingkat global, penyelenggaraan haji menjadi salah satu kegiatan keagamaan terbesar di dunia yang melibatkan jutaan manusia dari berbagai negara. Pemerintah Arab Saudi dalam beberapa dekade terakhir terus memperkuat sistem manajemen haji melalui pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan, dan pengaturan kerja sama dengan negara-negara pengirim jemaah.

Persetujuan DPR terhadap pembayaran uang muka tersebut diharapkan memperlancar seluruh tahapan persiapan haji 2027. Pemerintah memastikan proses pembayaran dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi akan dilakukan sesuai ketentuan agar hak pelayanan jemaah Indonesia tetap terjaga. (*)

DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Berjalan, Target Rampung pada 2026

Laporan: Radit

JAKARTA, BP-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tetap berjalan dan menjadi salah satu agenda prioritas legislasi nasional. DPR menegaskan tidak pernah mengambil sikap untuk menolak pembahasan regulasi tersebut, sekaligus membantah informasi yang berkembang di media sosial.

Pimpinan DPR menyebut RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Saat ini, proses penyusunan regulasi tersebut masih berlangsung melalui Komisi III DPR dengan melibatkan berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya telah melakukan rapat internal guna membahas langkah percepatan penyelesaian RUU Perampasan Aset. Menurutnya, isu yang menyebut DPR sengaja memperlambat pembahasan tidak memiliki dasar.

“Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan undang-undang yang lain, kalau dalam kurun waktu hanya dua sampai tiga minggu kemarin,” kata Habiburokhman.

Ia menjelaskan, Komisi III saat ini masih melakukan tahapan penyerapan aspirasi publik sebagai bagian dari mekanisme penyusunan undang-undang. Menurut dia, proses tersebut penting agar aturan yang nantinya disahkan tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kualitas dan mendapat dukungan masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yulianti sebelumnya juga menegaskan bahwa DPR tidak pernah menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut dalam Rapat Paripurna DPR untuk merespons kabar yang beredar luas di media sosial.

“Sehubungan dengan beredarnya di media sosial, berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembaha-

san RUU Perampasan Aset,” ujar Sari saat membuka Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7).

Sari menjelaskan, posisi RUU Perampasan Aset saat ini masih berada dalam tahap penyusunan dan pengumpulan masukan publik. Komisi III DPR, kata dia, berupaya menjalankan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dalam proses legislasi.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustopa menyatakan lembaganya memiliki target agar pembahasan RUU Perampasan Aset dapat selesai pada tahun ini. Ia menilai keberadaan regulasi tersebut penting sehingga harus menjadi perhatian bersama.

“Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan,” kata Saan.

Menurut Saan, percepatan pembahasan tetap harus berjalan dengan membuka ruang keterlibatan masyarakat. DPR ingin memastikan setiap substansi dalam RUU tersebut dapat dikaji secara komprehensif sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan.

Habiburokhman juga menilai pembahasan RUU Perampasan Aset berpotensi berjalan lebih cepat karena merupakan usul inisiatif DPR. Mekanisme tersebut, menurut dia, berbeda apabila rancangan undang-undang berasal dari pemerintah yang membutuhkan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari seluruh fraksi DPR.

“Kalau menjadi usul pemerintah, maka akan menimbulkan banyak sekali DIM, delapan kali lipat daripada apabila diusulkan oleh DPR,” ujar Habiburokhman.

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang telah lama mendapat perhatian publik karena berkaitan dengan upaya negara mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana. Gagasan mengenai aturan tersebut menguat seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap

pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.

Secara historis, Indonesia telah memiliki sejumlah aturan mengenai penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mekanisme penyitaan dalam hukum pidana. Namun, penguatan aturan khusus mengenai perampasan aset dinilai diperlukan agar negara memiliki instrumen hukum yang lebih efektif.

Di tingkat internasional, sejumlah negara telah lama menerapkan mekanisme asset recovery untuk mengejar aset hasil tindak pidana. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, misalnya, memiliki sistem hukum yang memungkinkan negara menyita aset tertentu meskipun proses pidana masih berjalan dengan mekanisme yang telah diatur.

Konsep perampasan aset juga menjadi bagian dari agenda global pemberantasan korupsi melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diadopsi pada 2003 dan telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Dengan masuknya RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2026, DPR menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembahasan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem hukum nasional dalam mencegah serta menindak kejahatan yang merugikan negara.

Hingga kini, DPR masih melanjutkan proses penyusunan, pengumpulan aspirasi, dan pembahasan substansi RUU sebelum memasuki tahap berikutnya dalam proses legislasi nasional. (*)

Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong Tiga Makam Sultan Buton Berstatus Cagar Budaya Nasional



Laporan: Mashuri

BAUBAU, BP- Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penetapan tiga makam Sultan Buton di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Cagar Budaya Nasional. Usulan tersebut diharapkan memperkuat perlindungan terhadap warisan sejarah Kesultanan Buton sekaligus meningkatkan nilai kawasan Benteng Wolio sebagai destinasi sejarah dan budaya bertaraf nasional.

Dorongan itu disampaikan Fadli Zon saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Keraton Buton, Minggu (12/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, serta Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu.

Tiga situs yang diusulkan memperoleh status Cagar Budaya Nasional meliputi makam Sultan Murhum sebagai Sultan Buton pertama, makam Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputa Yi Koo yang merupakan Sultan Buton ke-20, serta makam La Maani atau Oputa Kabumbu Malanga yang menjabat sebagai Sultan Buton ke-22.

Menurut Fadli Zon, keberadaan Benteng Kesultanan Buton yang telah lebih dahulu berstatus Cagar Budaya Nasional menjadi landasan kuat untuk memperluas perlindungan terhadap situs-situs bersejarah lain di kawasan tersebut.

“Benteng Kesultanan Buton telah menjadi Cagar Budaya Nasional. Karena itu, kami berharap tiga makam Sultan Buton juga dapat segera memper-

oleh status yang sama sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan nasional,” kata Fadli Zon.

Ia menegaskan pelestarian budaya tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan fisik semata. Pemerintah, kata dia, harus mengembangkan pemanfaatan, pembinaan, serta konservasi secara berkelanjutan agar warisan budaya mampu memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun mendatang.

“Pelindungan harus berjalan beriringan dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Semua itu membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dalam agenda yang sama, Fadli Zon bersama Gubernur Sulawesi Tenggara juga berziarah ke makam Sultan Murhum. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap tokoh penting yang meletakkan dasar berdirinya Kesultanan Buton sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai sejarah bangsa.

Ia menilai kompleks Benteng Kesultanan Buton merupakan aset budaya yang memiliki arti strategis, bukan hanya bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, tetapi juga bagi Indonesia. Menurutnya, penataan kawasan yang semakin baik akan memperkuat daya tarik wisata sejarah, wisata budaya, hingga wisata kuliner yang dimiliki Baubau.

“Kawasan ini merupakan kebanggaan bangsa. Dengan penataan yang semakin baik, saya optimistis akan semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara

datang untuk mempelajari sejarah sekaligus menikmati kekayaan budaya Buton,” ujar Fadli.

Benteng Kesultanan Buton atau Benteng Wolio sendiri merupakan salah satu benteng terluas dan paling bersejarah di Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah, benteng sepanjang sekitar 2,75 kilometer tersebut mulai dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-3, La Sangaji, kemudian disempurnakan pada masa Sultan Buton ke-4.

Keunikan benteng ini terletak pada proses pembangunannya yang dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Buton menggunakan batu karang dan kapur lokal. Benteng yang memiliki 12 pintu gerbang (lawar) dan 16 bastion tersebut tidak dibangun oleh kolonial Belanda maupun Portugis, sehingga menjadi salah satu simbol kemandirian masyarakat Nusantara dalam membangun sistem pertahanan kerajaan.

Secara historis, Kesultanan Buton merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di kawasan timur Indonesia yang berkembang sejak abad ke-16. Kesultanan ini dikenal memiliki sistem pemerintahan yang maju melalui Undang-Undang Martabat Tujuh, sebuah tata kelola pemerintahan yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara pada masanya. Kesultanan Buton juga menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Ternate, Kesultanan Gowa, hingga pemerintah kolonial VOC dalam menjaga stabilitas perdagangan di kawasan timur Nusantara.

Dalam konteks nasional, pelestarian cagar budaya memperoleh penguatan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menegaskan pentingnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai identitas bangsa. Sejak itu, berbagai situs bersejarah di Indonesia terus didorong memperoleh status cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan nasional.

Secara internasional, upaya pelestarian situs sejarah sejalan dengan Konvensi UNESCO 1972 tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia yang menempatkan warisan budaya sebagai aset peradaban manusia yang wajib dijaga secara berkelanjutan. Meskipun Benteng Wolio belum berstatus Warisan Dunia UNESCO, nilai sejarah, arsitektur, serta perannya dalam perkembangan peradaban maritim Nusantara dinilai menjadi modal penting untuk terus diperkenalkan kepada masyarakat internasional.

Dengan dorongan penetapan tiga makam Sultan Buton sebagai Cagar Budaya Nasional, pemerintah berharap kawasan Benteng Kesultanan Buton semakin utuh sebagai lanskap sejarah yang merekam perjalanan panjang peradaban Buton. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Indonesia sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata berbasis sejarah di Sulawesi Tenggara. (*)

Liangkobori Menuju Cagar Budaya Nasional, Metanduno Diusulkan ke UNESCO



Laporan: Mashuri

MUNA, BP- Pemerintah Indonesia akan menetapkan kawasan Gua Liangkobori di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai Cagar Budaya Nasional. Pada saat yang sama, Gua Metanduno disiapkan untuk diusulkan sebagai Warisan Dunia UNESCO setelah penemuan lukisan cadas berusia sekitar 67.800 tahun yang mendapat pengakuan internasional. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, saat membuka Festival Liangkobori IV Tahun 2026 di Desa Liangkobori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sabtu (11/7/2026).

Pengumuman itu menjadi tonggak baru bagi pelestarian warisan budaya Indonesia sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Muna sebagai salah satu kawasan penting dalam sejarah peradaban manusia. Pemerintah menilai pengakuan dunia terhadap situs prasejarah tersebut harus diikuti dengan langkah perlindungan yang lebih komprehensif melalui penetapan status cagar budaya nasional.

Festival Liangkobori IV yang menjadi momentum pengumuman tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Wakil Menteri Dalam Negeri, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda Sultra, Penjabat Sekretaris Daerah Sultra, Bupati dan Wakil Bupati Muna, serta unsur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Muna.

Menurut Fadli Zon, penetapan status cagar budaya nasional merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian ilmiah yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Griffith University Australia dengan dukungan Balai Pe-

lestarian Kebudayaan. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature pada 22 Januari 2026 dan menjadi rujukan penting dalam dunia arkeologi.

“Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah bagi Muna, Indonesia, dan ilmu pengetahuan dunia dengan ditemukannya lukisan cadas di Liang Metanduno yang berusia setidaknya 67.800 tahun,” ujar Fadli Zon dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, temuan tersebut kemudian diverifikasi Guinness World Records pada 26 Mei 2026 sebagai lukisan tertua di dunia dalam kategori seni nonfiguratif. Pengakuan itu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat perkembangan seni dan budaya manusia purba yang memiliki arti penting bagi sejarah peradaban dunia.

Dengan penetapan status cagar budaya nasional, pengelolaan dan pengembangan kawasan Gua Metanduno akan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Kebudayaan. Pemerintah juga akan melanjutkan penelitian terhadap berbagai lukisan cadas di kawasan Liangkobori, seperti gambar layang-layang, perahu, binatang, hingga aktivitas berburu yang diyakini menyimpan informasi penting mengenai kehidupan masyarakat prasejarah.

“Protection-First, Science-Led, dan Community-Based harus menjadi dasar dalam setiap langkah pengelolaan kawasan ini,” kata Fadli Zon. Menurutnya, perlindungan situs harus didahulukan sebelum promosi, seluruh kebijakan wajib berbasis data ilmiah, dan masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari warisan budaya tersebut.

Selain itu, Menteri Kebudayaan mengingkatkan pentingnya mitigasi terhadap ancaman kerusakan situs akibat perubahan iklim maupun aktivitas manusia. “Pengaturan kunjungan harus dilakukan secara

ketat agar kelestarian situs tetap terjaga bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kekayaan budaya daerahnya. “Warisan budaya ini merupakan aset bangsa yang harus kita jaga bersama. Pelestariannya membutuhkan sinergi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan seluruh masyarakat agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan,” ujarnya.

Secara historis, Indonesia telah lama menjadi salah satu pusat penelitian arkeologi dunia. Sebelum penemuan di Muna, kawasan karst Maros-Pangkep di Sulawesi Selatan telah menarik perhatian ilmuwan internasional setelah ditemukannya lukisan gua berusia puluhan ribu tahun yang mengubah pandangan lama bahwa seni cadas tertua hanya berkembang di Eropa. Di tingkat internasional, situs-situs seperti Gua Lascaux di Prancis dan Altamira di Spanyol selama bertahun-tahun menjadi rujukan utama sejarah seni prasejarah, namun berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan awal kebudayaan manusia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap penetapan Liangkobori sebagai Cagar Budaya Nasional dan usulan Gua Metanduno sebagai Warisan Dunia UNESCO mampu mendorong peningkatan penelitian arkeologi, konservasi, pendidikan, dan pariwisata berbasis pelestarian budaya. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan tersebut diharapkan berkembang menjadi destinasi wisata sejarah bertaraf internasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal tanpa mengurangi nilai autentik warisan budaya yang dimiliki Indonesia. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Serukan Pelestarian Tari Lariangi sebagai Identitas Budaya



Pewarta: La Harman

BAUBAU, BP-Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan pelestarian Tari Lariangi sebagai gerakan bersama guna menjaga identitas budaya Tanah Buton. Seruan tersebut disampaikan saat menghadiri Pagelaran Tari Lariangi Lintas Generasi dan Diskusi Budaya di Gedung Arasallana, Kota Baubau, Minggu (5/7/2026).

Menurut Bupati, keberlangsungan sebuah tradisi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh komitmen masyarakat, pelaku seni, tokoh adat, akademisi, hingga generasi muda untuk terus merawat dan mewariskannya. Karena itu, kegiatan lintas generasi dinilai menjadi ruang penting dalam memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Dalam kesempatan itu, Alvin memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini tetap menjaga eksistensi Tari Lariangi melalui berbagai pertunjukan budaya maupun proses pewarisan kepada generasi penerus. Ia menilai upaya tersebut merupakan bentuk nyata menjaga kekayaan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur.

"Pelestarian budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi mem-

butuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," ujar Alvin Akawijaya Putra.

Ia mengatakan, kekayaan budaya masyarakat Kaledupa dan Kabupaten Wakatobi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang peradaban Tanah Buton. Oleh karena itu, menjaga Tari Lariangi berarti turut menjaga identitas budaya masyarakat Kepulauan Buton secara keseluruhan.

"Bagi saya, budaya Buton di Kabupaten Wakatobi sangat menarik. Dari Tari Lariangi kita dapat melihat kekayaan nilai, sejarah, dan identitas yang dimiliki masyarakat Kaledupa," kata Alvin.

Pagelaran Tari Lariangi Lintas Generasi dan Diskusi Budaya digelar sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, budayawan, pelaku seni, serta masyarakat dalam memperkuat komitmen terhadap pelestarian warisan budaya daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi media edukasi agar generasi muda semakin mengenal nilai-nilai budaya yang dimiliki daerahnya.

Selain menyaksikan pertunjukan tari, para peserta mengikuti diskusi yang membahas pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan terhadap seni tradisi agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat

modern tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya.

"Tari Lariangi bukan sekadar pertunjukan seni, tetapi menyimpan sejarah, filosofi, dan jati diri masyarakat yang harus dijaga bersama," ujar Bupati.

Secara historis, Tari Lariangi dikenal sebagai salah satu tarian tradisional masyarakat Kaledupa yang berkembang sejak masa Kesultanan Buton. Tarian ini menjadi bagian dari tradisi penyambutan tamu kehormatan serta berbagai upacara adat yang mencerminkan nilai kesopanan, penghormatan, dan keanggunan perempuan dalam budaya masyarakat kepulauan.

Dalam konteks nasional, upaya pelestarian Tari Lariangi sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanusiaan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa kebudayaan merupakan investasi strategis bangsa untuk memperkuat karakter nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan seni dan budaya.

Sementara itu, secara internasional, pelestarian seni tradisi juga sejalan dengan Konvensi UNESCO Tahun 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention for the

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Konvensi tersebut mendorong setiap negara untuk menjaga tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, serta berbagai ekspresi budaya agar tidak hilang akibat perubahan zaman dan arus globalisasi.

Bupati berharap semangat pelestarian budaya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan diwujudkan melalui pendidikan, pembinaan komunitas seni, serta penyelenggaraan festival budaya secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar Tari Lariangi terus berkembang tanpa kehilangan nilai historis dan filosofi yang diwariskan para pendahulu.

"Saya berharap generasi muda terus mencintai budaya daerahnya sehingga Tari Lariangi tetap lestari sebagai kebanggaan masyarakat Buton dan Indonesia," tutup Alvin.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas seni, dan lembaga pendidikan, Tari Lariangi diharapkan tetap menjadi simbol identitas budaya Tanah Buton sekaligus memperkaya khazanah budaya nasional yang dapat dikenal hingga tingkat internasional. (*)

Tutup Bola Kasti, Wabup Buton Tengah Adam Basan Pastikan Piala Bupati Cup Jadi Agenda Tahunan Pembinaan Atlet



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berkomitmen menjadikan Turnamen Bola Kasti Piala Bupati Cup sebagai agenda tahunan guna memperkuat pembinaan olahraga sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Buton Tengah, Muh. Adam Basan, S.Sos., saat menutup secara resmi Turnamen Bola Kasti Piala Bupati Cup I di Lapangan J. Wayong, Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Rabu sore (8/7/2026).

Penutupan turnamen berlangsung di hadapan ratusan masyarakat yang memadati lapangan. Acara tersebut juga dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Camat Gu, Lurah Watulea, Lurah Bombonawulu, serta unsur masyarakat yang sejak awal memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kompetisi.

Dalam sambutannya, Adam Basan menegaskan bahwa pemerintah daerah melihat olahraga bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana membangun persatuan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan prestasi.

"Kami akan mengupayakan agar Turnamen Piala Bupati Cup menjadi agenda tahunan Kabupaten Buton Tengah sebagai wadah mempererat silaturahmi sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi," ujar Muh. Adam Basan.

Turnamen yang berlangsung selama lebih dari satu bulan tersebut diikuti 13 tim yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Buton Tengah. Selama pelaksanaan kompetisi,

si, pertandingan berlangsung aman, tertib, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Pada laga puncak, Family Star dari Lombe berhasil keluar sebagai juara pertama. Posisi runner-up ditempati Mama Eksis dari Wakuru, sedangkan Boncu dari Lombe berada di peringkat ketiga dan Gaspa dari Lombe menempati posisi keempat.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, peserta, aparat keamanan, serta masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan turnamen hingga berakhir tanpa kendala berarti.

"Terima kasih kepada panitia, seluruh peserta, dan masyarakat yang telah menjaga keamanan, ketertiban, serta sportivitas selama turnamen berlangsung," katanya.

Ia juga menilai kehadiran para pimpinan OPD pada acara penutupan merupakan bentuk nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terhadap pengembangan olahraga daerah. Menurutnya, sinergi seluruh perangkat daerah menjadi modal penting dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Adam Basan memastikan pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun-tahun mendatang, termasuk menambah nilai hadiah bagi para pemenang agar turnamen semakin kompetitif dan menarik minat peserta.

"Ke depan hadiah turnamen akan terus kami tingkatkan sehingga pelaksanaannya semakin semarak dan mampu menarik lebih banyak peserta," ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati secara resmi menutup Turnamen Bola Kasti Piala Bupati Cup I dan ber-

harap penyelenggaraan berikutnya dapat menghadirkan lebih banyak tim dari berbagai daerah sehingga kompetisi semakin berkualitas.

"Semoga tahun depan pelaksanaannya lebih meriah dengan partisipasi yang semakin luas," tuturnya.

Secara historis, penyelenggaraan turnamen olahraga tingkat daerah merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan atlet di Indonesia. Berbagai cabang olahraga nasional berkembang melalui kompetisi yang rutin digelar oleh pemerintah daerah sebelum atlet memasuki jenjang kejuaraan provinsi, nasional hingga Pekan Olahraga Nasional (PON). Pola pembinaan berjenjang tersebut telah lama menjadi strategi pemerintah dalam mencetak atlet berprestasi.

Dalam konteks internasional, berbagai negara dengan tradisi olahraga yang kuat juga membangun prestasi melalui kompetisi lokal yang berkesinambungan. Jepang, Korea Selatan, hingga Australia menjadikan turnamen tingkat komunitas sebagai fondasi pembinaan atlet usia dini sebelum memasuki kompetisi profesional. Model tersebut menunjukkan bahwa kontinuitas kompetisi merupakan salah satu faktor penting dalam melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Bagi Kabupaten Buton Tengah, Turnamen Bola Kasti Piala Bupati Cup I menjadi tonggak awal pembinaan olahraga bola kasti secara lebih terstruktur. Selain menjadi ajang mencari juara, kompetisi ini diharapkan memperkuat persaudaraan antarwilayah, meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga, serta menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun budaya hidup sehat melalui aktivitas olahraga yang berkelanjutan. (*)

BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp260,7 Miliar di Ruang Digital



JAKARTA, BP- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap peredaran kosmetik ilegal dengan estimasi nilai keekonomian mencapai Rp260,7 miliar dalam intensifikasi pengawasan yang dilakukan sepanjang Mei 2026. Temuan tersebut berasal dari pengawasan terhadap perdagangan kosmetik di platform digital maupun sarana distribusi offline yang dinilai masih menjadi jalur utama masuknya produk tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Konferensi Pers Hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Periode Mei 2026 di Jakarta, Rabu (13/7/2026), mengatakan transformasi digital seharusnya menjadi peluang bagi pertumbuhan industri kosmetik nasional, bukan dimanfaatkan untuk memperdagangkan produk ilegal. “Pelaku usaha wajib memastikan setiap kosmetik yang diproduksi, diimpor, dan didistribusikan telah memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu, termasuk yang dipasarkan secara online,” tegas Taruna.

Dalam operasi tersebut, BPOM memeriksa sebanyak 9.617 tautan penjualan kosmetik di berbagai platform digital. Hasilnya, sebanyak 9.042 tautan atau 94,02 persen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.

Pelanggaran didominasi kosmetik tanpa izin edar sebesar 95,24 persen, diikuti kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang sebesar 4,66 persen, serta kosmetik dengan klaim yang tidak sesuai definisi kosmetik sebesar 0,10 persen. Merek yang paling banyak ditemukan antara lain SVMY, DNM, LAMEILA, BERRIJOY, dan ZNXIMER.

Selain di ruang digital, BPOM juga melakukan inspeksi terhadap 190 sarana distribusi kosmetik di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 128 sarana atau 67,37 persen dinyatakan melanggar ketentuan. Petugas menemukan 2.205 item atau sekitar 2.127.765 pieces kosmetik dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai Rp35,8 miliar. Sebagian besar merupakan kosmetik tanpa izin edar dan lebih dari 90 persen berasal dari produk impor. Adapun merek yang paling banyak ditemukan ialah KIYOMI, SADOER, dan didistribusikan telah memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu, termasuk yang dipasarkan secara online,” tegas Taruna.

BPOM mencatat Tangerang menjadi wilayah dengan nilai temuan tertinggi, yakni sekitar Rp27,6 miliar, disusul Bogor Rp4,6 miliar dan Jakarta Rp2,3 miliar. Kedekatan wilayah tersebut dengan pelabuhan serta tersedianya fasilitas peralihan, yakni sekitar Rp27,6 miliar, disusul Bogor Rp4,6 miliar dan Jakarta Rp2,3 miliar. Kedekatan wilayah tersebut dengan pelabuhan serta tersedianya fasilitas peralihan, yakni sekitar Rp27,6 miliar, disusul Bogor Rp4,6 miliar dan Jakarta Rp2,3 miliar.

untuk mendistribusikan kosmetik ilegal. “BPOM tidak segan untuk bertindak tegas menegakkan hukum dan aturan bagi oknum pelaku usaha yang sengaja melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan,” ujar Taruna.

Sebagai tindak lanjut, BPOM menjatuhkan sanksi administratif berupa penarikan dan pemusnahan produk, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin edar. Lembaga tersebut juga memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membatasi akses impor bagi importir yang melanggar, serta menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Indonesian E-Commerce Association (IdeA) guna mempercepat penanganan pelanggaran di ruang digital. “Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditekan,” kata Taruna.

Secara historis, pengawasan kosmetik ilegal telah menjadi salah satu fokus BPOM dalam beberapa tahun terakhir. Tren perdagangan melalui marketplace dan media sosial yang meningkat sejak masa pandemi COVID-19 mendorong perubahan pola distribusi produk kosmetik sehingga pengawasan digital menjadi semakin penting. Pada periode 2024 dan 2025,

BPOM juga melakukan operasi serupa, namun jumlah serta nilai temuan pada 2026 tercatat lebih tinggi, menunjukkan semakin berkembangnya modus pelanggaran sekaligus meningkatnya efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan.

Fenomena peredaran kosmetik ilegal juga menjadi perhatian internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berbagai otoritas pengawas di sejumlah negara berulang kali mengingatkan bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokuinon, steroid, maupun asam retinoat tanpa pengawasan. Bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan gangguan kulit, kerusakan organ, hingga dampak kesehatan jangka panjang apabila digunakan secara tidak sesuai ketentuan.

BPOM mengimbau masyarakat agar selalu menerapkan prinsip Cek KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli kosmetik, terutama melalui platform digital. Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur harga murah maupun klaim berlebihan serta segera melaporkan dugaan peredaran kosmetik ilegal kepada HALOB-POM 1500533, Balai Besar/Balai/Loka POM di daerah, atau aparat penegak hukum agar perlindungan terhadap konsumen dapat terus diperkuat. (*)

Menkes dari Jongaya Makassar Tegaskan Kusta Bukan Kutukan, Pemerintah Targetkan Eliminasi 2030

MAKASSAR, BP- Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penyakit kusta bukanlah kutukan, melainkan penyakit infeksi akibat bakteri yang dapat disembuhkan melalui pengobatan yang tepat. Pernyataan itu disampaikan saat mengunjungi Kompleks Kusta Jongaya, RW 04, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu (11/7/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat eliminasi kusta sekaligus menghapus stigma sosial yang selama ini masih membayangi kehidupan para penyintas. Dalam agenda itu, Menkes hadir bersama Chairman The Nippon Foundation Yohei Sasakawa yang selama ini aktif mendukung berbagai program pengendalian kusta di dunia.

Di hadapan para penyintas dan masyarakat Kampung Kusta Jongaya, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa tantangan utama pemberantasan kusta saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga persoalan sosial akibat diskriminasi.

Menurut Menkes, masih adanya anggapan bahwa kusta merupakan penyakit yang memalukan menyebabkan sebagian masyarakat terlambat mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecacatan pada penderita.

“Kusta bukan kutukan. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan ada obatnya. Kalau ditemukan sejak dini, bisa sembuh,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Dalam kunjungan itu, Menkes berdialog langsung dengan sejumlah penyintas, termasuk Muhammad Ali yang saat ini masih menjalani pengobatan. Kisah Muhammad Ali menjadi contoh bahwa keterlambatan penanganan dapat menyebabkan dampak lebih serius, meskipun penyakit tersebut sebenarnya dapat dikendalikan.

Menkes menjelaskan, penderita kusta yang telah menjalani pengobatan tidak lagi menjadi sumber penularan seperti yang selama ini dikhawatirkan masyarakat. Karena itu, ia meminta keluarga maupun lingkungan sekitar tidak menjauhi penderita, melainkan memberikan dukungan agar mereka segera mendapatkan layanan kesehatan.

“Setelah mulai minum obat, penderita sudah tidak menularkan penyakitnya. Jadi masyarakat tidak perlu takut, tetapi segera membawa anggota keluarga yang memiliki gejala untuk diperiksa,” katanya.

Chairman The Nippon Foundation Yohei Sasakawa menambahkan, keberhasilan eliminasi kusta tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah kasus, tetapi juga dari hilangnya stigma terhadap penyintas. Menurutnya, setiap penyintas memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan layak tanpa perlakuan diskriminatif.

Sejarah panjang pemberantasan kusta menunjukkan bahwa stigma sosial telah menjadi persoalan global selama berabad-abad. Pada masa lalu, penderita

kusta di berbagai negara sering diasingkan dalam koloni khusus karena keterbatasan pemahaman medis. Namun, perkembangan ilmu kesehatan membuktikan bahwa kusta dapat disembuhkan dengan terapi kombinasi obat atau multidrug therapy (MDT) yang mulai digunakan secara luas sejak dekade 1980-an.

Di Indonesia, pemerintah mulai memperkuat program eliminasi kusta secara nasional sejak tahun 1990-an melalui strategi penemuan kasus aktif, pengobatan gratis, dan edukasi masyarakat. Indonesia kemudian menjadi salah satu negara dengan kontribusi besar dalam penanganan kusta global karena masih menemukan ribuan kasus baru setiap tahun.

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap warga Kampung Kusta Jongaya. Menurutnya, kehadiran Menteri Kesehatan memberikan motivasi baru bagi para penyintas untuk kembali percaya diri dan berperan aktif di tengah masyarakat.

“Kehadiran Bapak Menteri menjadi semangat baru bagi warga kami. Mereka membutuhkan dukungan agar kembali percaya diri dan dapat diterima oleh keluarga maupun masyarakat,” ujar Aliyah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan juga menyerahkan bantuan kebutuhan bagi warga Kampung Kusta Jongaya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup penyintas. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat dukungan sosial dan kesejahteraan warga yang terdampak penyakit kusta.

Kunjungan Menkes bersama The Nippon Foundation menjadi rangkaian kegiatan Konferensi Nasional Percepatan Eliminasi Kusta Tahun 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, organisasi penyintas, tenaga kesehatan, akademisi, serta mitra pembangunan untuk memperkuat strategi menuju Indonesia bebas kusta.

Pemerintah menargetkan eliminasi kusta dapat semakin mendekati capaian pada 2030 melalui peningkatan deteksi dini, perluasan layanan kesehatan, serta kampanye penghapusan stigma. Upaya tersebut menempatkan penyintas bukan sebagai kelompok yang harus di-jauhi, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Dengan pendekatan medis dan kemanusiaan, Kampung Kusta Jongaya di Makassar menjadi simbol perubahan cara pandang terhadap penyakit kusta. Dari tempat yang dahulu identik dengan pengasingan, kawasan tersebut kini menjadi ruang edukasi tentang pentingnya kepedulian, pengobatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. (Ardi)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi, Dalam Dugaan Suap Audit Muara Enim



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah rumah kediaman Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi yang berlokasi di Jakarta, Selasa (14/7).

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun penyidikan dugaan suap yang berkaitan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik mengeledah rumah Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, di Jakarta, Selasa (14/7).

Pengeledahan dilakukan setelah sebelumnya KPK mengamankan sejumlah dokumen penting dari Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Langkah itu dinilai sebagai bagian dari upaya penyidik memperkuat konstruksi perkara dengan menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan proses pemeriksaan keuangan daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan pengeledahan tersebut. Menurutnya, tindakan penyidik merupakan bagian dari proses pencarian alat bukti tambahan yang diperlukan dalam penyidikan.

“Benar, hari ini penyidik melakukan pengeledahan di rumah saudara BB yang berlokasi di wilayah Jakarta,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7).

Dalam pengeledahan itu, penyidik menyita sejumlah Ba-

rang Bukti Elektronik (BBE) yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan suap. Barang bukti tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.

“Dalam pengeledahan ini penyidik mengamankan beberapa Barang Bukti Elektronik (BBE),” kata Budi.

Ia menjelaskan seluruh perangkat elektronik yang diamankan akan melalui proses ekstraksi data guna memperoleh informasi digital yang dapat memperkuat pembuktian perkara.

“BBE ini selanjutnya akan diekstrak untuk kebutuhan pendalaman informasi yang dibutuhkan penyidik,” tambahnya.

Sebelum mengeledah rumah Bobby Adhityo Rizaldi, penyidik KPK telah lebih dahulu melakukan pengeledahan di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang dinilai penting dalam mengungkap dugaan praktik suap pada proses audit.

Dokumen yang diamankan antara lain berupa kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan opini audit dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dokumen mengenai upaya perubahan kembali hasil pemeriksaan setelah operasi tangkap tangan KPK,

hingga petunjuk yang mengarah pada dugaan intervensi dari BPK Pusat terhadap hasil audit.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya diduga sebagai pemberi suap, yakni Bupati Muara Enim periode 2025-2030 Edison serta dua pihak dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA), Cory Erin Hardi dan Fika. Sementara dua tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni ASN BPK sekaligus pengendali teknis Titin Rita Lestari dan pihak swasta August Dewanggara alias Angga.

Hingga berita ini disusun, Bobby Adhityo Rizaldi belum memberikan pernyataan terkait pengeledahan di kediamannya. KPK juga belum mengungkap hasil analisis awal terhadap barang bukti elektronik yang telah disita karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses audit lembaga negara yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Apabila terbukti, praktik tersebut berpotensi merusak kredibilitas sistem pemeriksaan keuangan pemerintah serta mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil audit.

Secara historis,

KPK telah beberapa kali mengusut perkara korupsi yang melibatkan auditor negara. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik terjadi pada 2017 ketika auditor BPK menerima suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perkara tersebut menjadi salah satu momentum penguatan pengawasan terhadap independensi auditor negara.

Dalam konteks internasional, lembaga audit negara di berbagai negara juga pernah menghadapi tantangan serupa. Organisasi Internasional Lembaga Pemeriksa Keuangan Tertinggi (INTOSAI) secara konsisten menegaskan bahwa independensi auditor, integritas, akuntabilitas, serta bebas dari intervensi merupakan prinsip utama agar hasil pemeriksaan keuangan publik dapat dipercaya dan menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang bersih.

KPK menegaskan penyidikan perkara dugaan suap audit di Muara Enim masih terus berlangsung. Penyidik membuka peluang melakukan pengembangan terhadap pihak lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)

KPK Perkuat Supervisi Kasus Febrie, Ketua Lembaga Temui Jaksa Agung



Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Langkah tersebut diperkuat melalui koordinasi yang telah dilakukan Ketua KPK Setyo Budiyanto dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan komunikasi antara kedua pimpinan lembaga penegak hukum itu bukan hal baru. Menurutnya, pembahasan mengenai mekanisme supervisi telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu sebagai bentuk sinergi dalam mengawal proses penegakan hukum.

“Sedikit banyak sudah ada pembahasan dari beberapa waktu yang lalu,” ujar Setyo kepada wartawan usai menghadiri peluncuran sebuah buku di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7).

Ia menjelaskan, koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum, menjunjung tinggi independensi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Meski demikian, Setyo belum menguraikan secara rinci bentuk supervisi yang akan dilakukan KPK. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah lembaganya tetap mengacu pada kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kewenangan yang kita lakukan adalah

kewenangan supervisi, yaitu melakukan koordinasi dan supervisi,” kata Setyo.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menyatakan komitmennya untuk melibatkan KPK dalam pengawasan penanganan perkara tersebut. Langkah ini dinilai penting agar proses penyidikan tetap berlangsung objektif, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa supervisi KPK merupakan bagian dari upaya memperkuat kredibilitas penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

“Untuk menjamin independensi dan profesionalisme, kami akan melibatkan supervisi dari KPK,” ujar Anang kepada wartawan.

Sementara itu, KPK juga telah memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara yang berkaitan dengan mantan Jampidsus tersebut akan dilakukan secara transparan, profesional, serta sesuai dengan prinsip due process of law. Transparansi menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga akuntabilitas proses hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi koordinasi dan supervisi KPK terhadap aparat penegak hukum lain telah menjadi bagian dari mekanisme pemberantasan korupsi sejak lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Setelah revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kewenangan tersebut tetap dipertahankan

sebagai instrumen pengawasan agar penanganan perkara korupsi berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Secara historis, koordinasi antar-lembaga penegak hukum juga menjadi praktik yang diterapkan di berbagai negara. Lembaga antikorupsi seperti Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura maupun Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong menerapkan pola koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian guna memastikan penyidikan terhadap perkara yang melibatkan pejabat negara berlangsung independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengamat hukum menilai, sinergi antara KPK dan Kejaksaan Agung dalam perkara yang menjadi perhatian publik merupakan langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Dengan adanya supervisi, setiap tahapan penyidikan diharapkan berlangsung sesuai prosedur, transparan, serta terbuka terhadap mekanisme pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kasus dugaan suap dan TPPU yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah kini menjadi salah satu perkara yang mendapat sorotan luas. Oleh karena itu, komitmen KPK dan Kejaksaan Agung untuk memperkuat koordinasi diharapkan mampu menjamin proses hukum berjalan profesional, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. (*)

Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Pastikan Evaluasi P3K untuk Penataan SDM, Bukan Pemberhentian



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau memastikan evaluasi terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), baik penuh waktu maupun paruh waktu, dilakukan untuk memperkuat penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur, bukan sebagai langkah pemberhentian pegawai. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., saat memimpin apel pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di pelataran Kantor Wali Kota Baubau, Senin (13/7/2026).

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memperbarui basis data kepegawaian sekaligus menyesuaikan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting menyusul adanya laporan mengenai sejumlah P3K yang mengundurkan diri sehingga diperlukan pemutakhiran data secara menyeluruh di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

"Evaluasi ini bukan untuk merumahkan atau memberhentikan P3K. Tujuannya adalah merapikan kembali database dan menempatkan Bapak dan Ibu pada posisi yang lebih tepat sesuai kompetensi," kata Wa Ode Hamsinah Bolu.

Ia meminta seluruh pimpinan OPD melakukan evaluasi terhadap personel di unit kerja masing-masing agar proses penataan ASN berlangsung objektif, transparan,

dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain membahas penataan P3K, Wakil Wali Kota juga menyoroti percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Berdasarkan hasil evaluasi pekan sebelumnya, masih terdapat sejumlah OPD yang belum menuntaskan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) melalui aplikasi Sri-kandi yang merupakan bagian dari program digitalisasi administrasi pemerintahan secara nasional.

"Setelah apel ini kita akan menggelar rapat pimpinan bersama seluruh kepala OPD. Saya berharap penerapan TTE di level eselon II sudah tuntas seratus persen sebelum diteruskan ke seluruh jenjang organisasi," ujarnya.

Menurutnya, seluruh ASN dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penguasaan sistem digital tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih cepat, efisien, akuntabel, dan sesuai tuntutan reformasi birokrasi.

Pada kesempatan yang sama, Wa Ode Hamsinah Bolu juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengeluarkan peringatan dini terkait perubahan cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di wilayah

Kota Baubau.

Ia mengapresiasi kinerja petugas pemadam kebakaran yang dinilai sigap menangani sejumlah kejadian kebakaran dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, masyarakat dan seluruh ASN diminta tetap meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan guna mencegah munculnya titik-titik kebakaran baru.

"Kalau saat musim hujan kita fokus membersihkan saluran air agar tidak banjir, maka di musim panas perhatian kita harus tertuju pada pencegahan kebakaran," tegasnya.

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, Wakil Wali Kota mengajak seluruh perangkat daerah menggalakkan budaya bersih di lingkungan kerja. Ia mengapresiasi camat dan lurah yang telah lebih dahulu melakukan penataan kawasan perkantoran tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah kota.

"Mari kita mulai dari kantor kita sendiri. Rapihkan, bersihkan, dan tanami dengan bunga agar lingkungan kerja menjadi lebih indah. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus memberi teladan melalui pelayanan yang berkualitas dan lingkungan yang nyaman," tuturnya.

Secara historis, digitalisasi administrasi pemerintahan di Indonesia semakin dipercepat sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan tersebut mendorong seluruh instansi pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi, serta efisiensi birokrasi.

Di tingkat internasional, transformasi pemerintahan digital juga menjadi agenda penting berbagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations E-Government Survey secara berkala menilai kemajuan digitalisasi pemerintahan sebagai salah satu indikator kualitas tata kelola publik. Penerapan layanan digital, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem administrasi berbasis teknologi, dinilai mampu mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Sementara itu, penataan ASN melalui evaluasi kompetensi juga sejalan dengan arah reformasi birokrasi nasional yang menempatkan profesionalisme, merit system, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Baubau berharap mampu membangun birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. (*)

Mewakili Wali Kota Baubau, Dr Moh Tasdik Tutup Kejuaraan Angkat Berat Sultra 2026, Atlet Diminta Jadikan Podium sebagai Awal Prestasi



Laporan: Firman

BAUBAU, BP- Kejuaraan Angkat Berat Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2026 resmi ditutup di Gedung SKOPMA Wajo, Kota Baubau, Jumat (10/7/2026). Penutupan dilakukan oleh Staf Ahli Wali Kota Baubau Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Dr. Mohamad Tasdik, M.Si., mewakili Wali Kota Baubau. Pemerintah Kota Baubau menegaskan kejuaraan tersebut menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet sekaligus menyiapkan lifter daerah menghadapi kompetisi yang lebih tinggi.

Kejuaraan yang diikuti kontingen dari 11 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara itu tidak hanya menjadi arena perebutan medali, tetapi juga bagian dari proses seleksi dan pembinaan atlet menuju kejuaraan tingkat nasional. Ajang tersebut diharapkan mampu memperkuat regenerasi atlet angkat berat di Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan.

Dalam sambutan Wali Kota Baubau yang dibacakan Dr. Mohamad Tasdik, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan seorang atlet tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir pertandingan, melainkan juga oleh proses latihan, disiplin, serta kemampuan menjaga semangat juang selama menjalani pembinaan.

"Di balik setiap angkatan yang berhasil, ada jiwa yang pantang menyerah, ada disiplin yang dibangun selama bertahun-tahun, dan ada harapan daerah yang dibawa di atas pundak para atlet," ujar Mohamad Tasdik saat membacakan sambutan Wali Kota Baubau.

Wali Kota juga mengingatkan para atlet yang berhasil

meraih podium agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, keberhasilan dalam kejuaraan tingkat provinsi harus menjadi batu loncatan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi pada tingkat nasional maupun internasional.

"Jadikan podium sebagai pijakan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, bukan sebagai akhir dari perjalanan," demikian pesan Wali Kota yang dibacakan Tasdik.

Sementara itu, atlet yang belum berhasil meraih medali diminta tidak berkecil hati. Pemerintah berharap pengalaman bertanding menjadi bekal berharga untuk terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang konsisten, evaluasi teknik, serta pembinaan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Baubau juga memberikan apresiasi kepada seluruh pelatih dan ofisial yang dinilai telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam membina atlet hingga mampu tampil pada kejuaraan tingkat provinsi. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada panitia pelaksana yang berhasil menyelenggarakan kejuaraan secara tertib, aman, dan profesional.

Menjelang penutupan kegiatan, Wali Kota melalui Dr. Mohamad Tasdik menyampaikan penghargaan kepada seluruh kontingen dari luar Kota Baubau yang telah berpartisipasi. "Semoga perjalanan pulang diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran. Bawalah pulang kebanggaan yang baik serta persaudaraan yang telah terjalin selama kejuaraan berlangsung," katanya.

Secara historis, pembinaan olahraga angkat berat di Indonesia terus berkembang sejak cabang olahraga ini mulai dipertandingkan secara rutin dalam Pekan Olahraga

Nasional (PON). Kejuaraan tingkat provinsi menjadi salah satu mata rantai penting dalam sistem pembinaan nasional untuk menjaring atlet potensial sebelum berlaga pada kejuaraan nasional maupun internasional Indonesia di berbagai ajang internasional.

Indonesia sendiri telah mencatat sejumlah prestasi membanggakan pada cabang olahraga kekuatan, baik angkat berat maupun angkat besi. Keberhasilan atlet Indonesia menembus podium berbagai kejuaraan Asia dan dunia menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dari daerah memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan prestasi nasional.

Di tingkat internasional, olahraga angkat berat berkembang pesat melalui berbagai kejuaraan dunia yang diselenggarakan secara berkala oleh federasi internasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan sejumlah negara Eropa menerapkan sistem kompetisi berjenjang dari tingkat lokal hingga nasional sebagai fondasi lahirnya atlet elite dunia. Model pembinaan tersebut menjadi salah satu rujukan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam membangun ekosistem olahraga prestasi.

Kejuaraan Angkat Berat Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Kota Baubau diharapkan menjadi titik awal lahirnya lifter-lifter potensial yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional bahkan internasional. Selain memperkuat kualitas atlet, kejuaraan ini juga mempererat persaudaraan antarkontingen serta memperkokoh komitmen bersama dalam memajukan olahraga prestasi di Bumi Anoa. (*)